



Judul : DPR ke Luar Negeri Bahas Logo Palang Merah
Tanggal : Jumat, 31 Agustus 2012
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : A6

DPR ke Luar Negeri Bahas Logo Palang Merah

“Cukup cari informasinya di situs resmi atau Internet.”

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menggelar kunjungan ke luar negeri lagi. Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan ada dua negara yang akan dikunjungi 18 anggota badan yang mengurus program legislasi nasional itu, yakni Turki dan Denmark. “Kunjungan ini berkaitan dengan penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang Palang Merah Indonesia,” katanya kemarin.

Menurut Mulyono, beberapa isu krusial yang akan dipelajari para wakil rakyat yang pelesir itu adalah perbedaan logo Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Para anggota Badan Legislasi akan mengunjungi Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, parlemen, dan markas Bulan Sabit Merah di Turki, serta kantor Palang Merah di Denmark.

Kunjungan itu digelar pada 3-8 September. Rombongan yang pergi ke Turki dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Anna Mu’awanah. Sedangkan Wakil Ketua dari Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Dimiyati, memimpin rombongan ke Denmark. Satu rombongan terdiri atas sembilan anggota Badan Legislasi.

Anggota yang akan berangkat ke Turki antara lain Sunardi Ayub dari Partai Hati Nurani Rakyat, Khatibul Umam Wiranu dan Hary Witjaksono dari Partai Demokrat, Mardani dari Partai Keadilan Sejahtera, serta Rusli Ridwan dari Partai Amanat Nasional. Sedangkan yang akan berangkat ke Denmark masih menunggu konfirmasi.

Sebelumnya, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa mengunjungi Cina dan Brasil. Para anggota Panitia Khusus yang juga menjadi anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang

Pemerintahan Daerah itu juga berkunjung ke Jerman dan Prancis.

Kunjungan ini menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen. Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, menilai kunjungan itu tak bermanfaat dan menghabiskan duit negara. Ia memperkirakan biaya kunjungan ke dua negara tersebut mencapai US\$ 281 ribu atau sekitar Rp 2,669 miliar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandi menilai kunjungan itu terlalu berlebihan. Musababnya, studi banding DPR tersebut hanya mempelajari penggunaan tanda palang dan tanda bulan sabit. “Cukup cari informasinya di situs resmi atau Internet,” kata Ronald. Ia menilai perampungan draf Rancangan Undang-Undang Palang Merah tak terlalu rumit sehingga tak memerlukan kunjungan ke luar negeri. ● IRA GUSLINA SUFA